

Analisis Aplikasi “ASN Memayu” Di Lingkungan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta

Taufan¹, M.R Rahmatul Hidayat³

Email:

taufan.alwany@umi.ac.id¹, mryanhidayat12@gmail.com²

Universitas Muslim Indonesia¹, Universitas Meahmadiyah Bandung²

Corresponding author

M.R Rahmatul Hidayat

Universitas Meahmadiyah Bandung, Indonesia

mryanhidayat12@gmail.com

Received: Nov 13, 2023

Revised: Des 01, 2023

Accepted: Des 17, 2023

Available Online: Des 30, 2023

ABSTRACT

Di era percepatan informasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian sangat diperlukan sebagai pengolah administrasi pegawai dari lingkup kecil ke lingkup besar dalam konteks lingkungan pemerintahan. Dengan perkembangan dan kebutuhan yang semakin banyak mengakibatkan banyak perubahan dan regulasi dalam proses administrasi yang diharapkan dapat lebih efisien, efektif dan akurat dalam pengambilan keputusan dalam manajemen ASN. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis analisis aplikasi ASN Memayu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan faktor pendukung penerapan digitalisasi system informasi kepegawaian Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Pengumpulan data menggunakan pengumpulan data dokumentasi berupa berita media massa, jurnal dan dokumen lainnya sesuai dengan tema. Analisis data yang digunakan dengan mereduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan data kepegawaian di Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya melalui aplikasi ASN Memayu, telah mengalami kemajuan yang signifikan. Perubahan mencerminkan tekad untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan akurasi data. Pengembangan aplikasi ASN Memayu oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DIY merupakan langkah strategis dalam menyambut era digitalisasi, yang terwujud melalui rebranding sistem kepegawaian dan penggunaan teknologi digital. Tindakan progresif yang diambil BKD DIY membentuk dasar yang kuat untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam manajemen sumber daya manusia. Adopsi teknologi informasi dalam pengelolaan kepegawaian bukan hanya keharusan, melainkan juga manifestasi nyata dari komitmen untuk mencapai tata kelola yang baik dan pelayanan publik yang optimal melalui pemanfaatan teknologi informasi secara menyeluruh.

Kata Kunci: Aparatur Sipil Negara, Digitalisasi, Pemerintahan, ASN Memayu

ABSTRACT

In the era of accelerating information, the Personnel Management Information System is very necessary to process employee administration from small to large scope in the context of the government environment. With increasing developments and needs resulting in many changes and regulations in the administrative process which is expected to be more efficient, effective and accurate in decision making in ASN management. The aim of this research is to analyze the ASN Memayu application within the Yogyakarta Special Region Provincial Government, and the supporting factors for implementing the digitization of the Yogyakarta Special Region Government's personnel information system. This research method is descriptive qualitative with a literature study

approach. Data collection uses documentary data collection in the form of mass media news, journals and other documents according to the theme. Data analysts are used to reduce data, present data and draw conclusions. The research results explain that the application of information technology in managing personnel data in the Yogyakarta Special Region Provincial Government, especially through the ASN Memayu application, has experienced significant progress. The changes reflect a determination to improve efficiency, security and data accuracy. The development of the Memayu ASN application by the DIY Provincial Civil Service Agency is a strategic step in welcoming the era of digitalization, which is realized through rebranding of the civil service system and the use of digital technology. The progressive actions taken by BKD DIY form a strong basis for increasing effectiveness, efficiency and accountability in human resource management. The adoption of information technology in personnel management is not only a necessity, but also a real manifestation of commitment to achieving good governance and optimal public services through the comprehensive use of information technology.

Keyword: Civil Servant, Digitalization, Government, ASN Memayu

PENDAHULUAN

Penerapan teknologi informasi dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan bertujuan mengarahkan pemerintah menuju konsep good governance (Sururi, 2017). Good governance memandang pentingnya pengelolaan pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Dalam kerangka ini, sistem informasi menjadi landasan integral untuk menyelenggarakan pelayanan publik dengan efektif dan efisien (Simanjuntak, dkk, 2012). Adopsi teknologi informasi tidak hanya sekadar pelengkap, melainkan sebagai fondasi yang mampu mengakomodir kebutuhan pelayanan yang memenuhi standar good governance.

Dalam mewujudkan good governance, sistem informasi berperan penting dalam menciptakan otomatisasi proses kerja dan fungsi pelayanan (Agung, & Arifin, 2020; Musdalifah, dkk, 2019). Otomatisasi menjadi kunci utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mengurangi kesalahan manusia dan meningkatkan efisiensi (Riskika, & Meirinawati, 2020). Penggunaan teknologi informasi dapat diterapkan secara holistik, termasuk dalam pengelolaan sistem kepegawaian. Integrasi sistem informasi pada tingkat kepegawaian tidak hanya menyederhanakan tugas administratif, tetapi juga meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam penanganan berbagai aspek manajemen sumber daya manusia.

Konsep good governance dalam konteks pemanfaatan teknologi informasi di dalam pemerintahan mengemuka sebagai upaya strategis untuk mencapai pelayanan yang berkualitas. Sistem informasi menjadi fondasi utama yang memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif. Dengan adanya teknologi informasi, terjadi transformasi signifikan dalam otomatisasi berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan, termasuk manajemen kepegawaian. Otomatisasi pada level kepegawaian tidak hanya meningkatkan produktivitas, melainkan juga membentuk landasan untuk tata kelola yang lebih baik dan transparan.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, pengintegrasian teknologi informasi dapat diartikulasikan sebagai implementasi konkret dari niat baik untuk

mewujudkan good governance. Manifestasi ini merujuk pada penggunaan sistem informasi yang menyeluruh, mencakup aspek pelayanan publik dan manajemen kepegawaian, sebagai bagian integral dari strategi pemerintah dalam menegakkan prinsip-prinsip good governance. Peluang untuk otomatisasi yang holistik muncul sebagai hasil langsung dari integrasi sistem informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan fokus pada pelayanan publik dan manajemen kepegawaian, pendekatan ini membuka pintu bagi transformasi signifikan dalam cara pemerintah menjalankan tugas-tugasnya. Kemampuan sistem informasi untuk menyederhanakan dan mengotomatisasi proses operasional menjadi landasan bagi pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat (Alhamri, dkk 2018).

Pendekatan pemanfaatan teknologi informasi tidak hanya merupakan strategi teknis semata, melainkan suatu upaya sistematis untuk memberikan pelayanan yang responsif, cepat, dan akurat kepada masyarakat. Penerapan sistem informasi dalam skala luas membentuk dasar bagi pemerintah untuk merespons kebutuhan masyarakat dengan lebih baik (Sabila, 2022; Anam, dkk, 2023). Dengan cara ini, good governance bukanlah semata konsep yang diidamkan, tetapi menjadi sebuah realitas yang dapat diwujudkan melalui langkah-langkah nyata dalam pemanfaatan teknologi informasi dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan. Komitmen terhadap good governance tidak hanya tercermin dalam retorika, tetapi lebih jauh lagi, melibatkan peran teknologi informasi sebagai sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Melalui integrasi yang bijaksana dan holistik, pemerintah dapat mencapai efisiensi operasional, meningkatkan kualitas pelayanan, dan menciptakan tata kelola yang transparan. Hasilnya, good governance bukan sekadar idealisme, melainkan suatu realitas yang dapat diwujudkan melalui implementasi teknologi informasi yang cermat dan terencana dalam setiap lapisan penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam era Globalisasi, masyarakat menegaskan tuntutan yang mendesak kepada pemerintah untuk menginisiasi reformasi menyeluruh dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Fokus reformasi tersebut mencakup berbagai aspek, termasuk area vital seperti Sumberdaya Manusia Aparatur (kepegawaian). Di tengah dinamika global, masyarakat menuntut agar pengelolaan manajemen sumberdaya aparatur dapat diakses dengan mudah, baik oleh masyarakat umum maupun oleh aparatur sipil negara (Nasrika, 2019; Satriya, 2013).

Dalam kerangka reformasi, perubahan substantif terjadi pada dimensi Sumberdaya Manusia Aparatur, memaksa implementasi manajemen sumberdaya aparatur yang dapat diakses secara transparan oleh masyarakat dan para aparatur sipil negara. Perubahan ini tidak hanya menjadi respons terhadap tuntutan masyarakat yang semakin kritis, tetapi juga sebagai langkah menuju tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel. Proses reformasi ini secara khusus merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan standar good governance dan pelayanan publik yang berkualitas menjadi imperatif di era SPBE. Oleh karena itu, sistem pemerintahan berbasis elektronik menjadi sarana yang tak terelakkan dalam mengimplementasikan reformasi tersebut. Dengan merinci prinsip-prinsip efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas, Peraturan Presiden tersebut membuka jalan bagi pembentukan sistem yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta memperkuat daya saing pemerintah di tingkat global.

Pengenalan era SPBE sebagai respon terhadap tuntutan reformasi membuktikan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik menjadi tonggak utama dalam menciptakan tata kelola yang lebih bersih dan efisien. Dengan demikian, pemerintah berupaya membangun fondasi yang kokoh untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan terpercaya, memastikan kepuasan masyarakat serta mengakomodasi dinamika globalisasi dengan optimal.

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menanggapi kebutuhan akan pelayanan kepegawaian yang efektif dan efisien dengan merancang dan mengimplementasikan sistem digitalisasi yang komprehensif. Digitalisasi ini merangkum sejumlah aspek penting dalam manajemen kepegawaian, meliputi perencanaan, presensi, penilaian kinerja, pengelolaan jabatan fungsional, usulan kenaikan pangkat, pengembangan kompetensi, dan usulan pensiun. Kendati demikian, kompleksitas aplikasi yang berkembang pada masing-masing sub-kepegawaian memberikan tantangan tersendiri, terutama dalam aspek penginputan dan pencarian data oleh pegawai.

Sejalan dengan upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas pelayanan kepegawaian, Pemerintah Daerah DIY, khususnya pada aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG), mengambil langkah signifikan dengan melakukan rebranding menjadi ASN Memayu. Rebranding ini diinisiasi untuk memberikan solusi terhadap tantangan yang dihadapi, termasuk kendala dalam pengelolaan data dan penggunaan aplikasi yang terfragmentasi. Melalui rebranding ini, diharapkan terjadi peningkatan aksesibilitas dan pemanfaatan layanan kepegawaian yang lebih optimal.

Langkah rebranding yang diambil oleh Pemerintah Daerah DIY dalam mengubah SIMPEG menjadi ASN Memayu tidak hanya bersifat kosmetik, melainkan merupakan bagian integral dari strategi peningkatan kapabilitas sistem kepegawaian. ASN Memayu dirancang dengan tujuan utama untuk mempermudah proses akses dan pemanfaatan layanan kepegawaian. Ini mencakup segala aspek, mulai dari penyederhanaan proses pengisian data hingga peningkatan kejelasan tata kelola aplikasi, sehingga memberikan dampak positif terhadap produktivitas pegawai.

Rebranding SIMPEG menjadi ASN Memayu merupakan tonggak penting dalam evolusi pelayanan kepegawaian di Pemerintah Daerah DIY. Transformasi ini tidak hanya mengakomodir kebutuhan praktis pegawai, tetapi juga menciptakan dasar yang kokoh untuk pencapaian pelayanan kepegawaian yang berdaya saing dan sesuai dengan tuntutan zaman. Dengan upaya ini, Pemerintah Daerah DIY menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola kepegawaian yang modern, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan riil pegawai.

Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) adalah suatu aplikasi perangkat lunak yang memiliki tujuan utama sebagai alat pengolah data masukan. Informasi yang dihasilkan oleh SIMPEG diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pegawai maupun instansi yang saling terintegrasi di dalam konteks lingkungan pemerintahan (Syahrudin, 2019; Yahya, 2017). Fungsinya mencakup pemrosesan data administrasi pegawai dari skala kecil hingga skala besar, dan integrasinya dianggap krusial dalam mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas pelayanan administrasi publik.

Pada era percepatan informasi, keberadaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) menjadi imperatif dalam lingkup administrasi pegawai di berbagai skala, yang beroperasi sebagai perangkat lunak pengolah data yang mampu menyediakan informasi sesuai dengan kebutuhan pegawai dan instansi terkait. Simpulan informasi ini diintegrasikan dengan baik dalam kerangka kerja pemerintahan, memfasilitasi transformasi dari administrasi pegawai dalam lingkup kecil hingga pengelolaan kepegawaian dalam skala besar.

Perkembangan dan kebutuhan yang terus berkembang di dalam lingkungan pemerintahan menuntut Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) untuk beradaptasi secara dinamis. Perubahan dan peningkatan regulasi dalam proses administrasi pegawai menjadi hal yang lumrah, sehingga SIMPEG diharapkan mampu menjawab tantangan ini dengan efisien, efektif, dan akurat. Dalam konteks ini, SIMPEG bukan hanya sebagai alat pengolahan data, melainkan juga sebagai instrumen yang mendukung pengambilan keputusan yang berkualitas tinggi dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kehadiran Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) menandai pergeseran paradigma dalam administrasi pegawai di lingkungan pemerintahan. Dengan fokus pada pemrosesan data dan integrasi informasi, SIMPEG memainkan peran sentral dalam menjawab tantangan efisiensi, efektivitas, dan akurasi dalam pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN). Oleh karena itu, SIMPEG bukan sekadar alat teknologi informasi, melainkan suatu solusi integral yang mendukung transformasi administratif yang mampu memenuhi dinamika kompleksitas pemerintahan di era informasi.

Badan Kepegawaian Daerah DIY, dalam rangka mendukung percepatan berbasis elektronik, telah menginisiasi pembangunan dan pengembangan aplikasi kepegawaian yang dikenal sebagai "ASN Memayu". Merupakan hasil rebranding dari Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) di lingkungan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, aplikasi ini dirancang sebagai upaya pembaruan untuk menyederhanakan proses administrasi kepegawaian. ASN Memayu bukan sekadar sebuah sistem, melainkan menjadi wadah bagi berbagai aplikasi yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi DIY, bertujuan untuk mempermudah akses dan manajemen kepegawaian.

Dalam konteks penerapan "ASN Memayu", terdapat sejumlah fungsi yang dapat diakses dan dikelola oleh pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Mulai dari perencanaan pegawai, presensi, penilaian kinerja, hingga pengelolaan jabatan fungsional, usulan kenaikan pangkat, pengembangan kompetensi, dan usulan pensiun. Penerapan digitalisasi ini membentuk ekosistem terintegrasi untuk

manajemen kepegawaian, menyediakan layanan yang lebih efisien dan responsif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan teknologi informasi dalam konteks kepegawaian dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan pemerintahan. Melalui pendekatan ini, penelitian akan merinci faktor-faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi keberhasilan implementasi digitalisasi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang mendalam dan terperinci mengenai implementasi sistem digitalisasi Informasi Kepegawaian yang dikenal sebagai "ASN Memayu" di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Fokus penelitian terpusat pada Badan Kepegawaian Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai unit utama yang mengelola dan menerapkan sistem tersebut.

Dalam mengumpulkan data, penelitian ini menerapkan teknik observasi, dokumentasi, dan wawancara. Teknik observasi dilakukan dengan partisipasi pasif, di mana peneliti mengamati secara mendalam seluruh kegiatan yang melibatkan penerapan ASN Memayu di Badan Kepegawaian Daerah Istimewa Yogyakarta. Penggunaan teknik observasi memberikan pemahaman yang holistik terkait implementasi sistem kepegawaian tersebut tanpa intervensi langsung dari peneliti. Penggunaan teknik wawancara dalam penelitian ini diarahkan untuk mendapatkan pemahaman lebih terbuka mengenai permasalahan yang mungkin timbul seiring dengan penerapan ASN Memayu. Narasumber, yang merupakan pihak terkait di Badan Kepegawaian Daerah Istimewa Yogyakarta, diwawancarai untuk menggali pandangan, pendapat, dan ide-ide yang berkaitan dengan implementasi sistem tersebut. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk merinci dan memahami secara mendalam dinamika yang terjadi dalam konteks penerapan teknologi informasi ke dalam kegiatan kepegawaian. Selain itu, dokumentasi turut diadopsi dalam penelitian ini untuk mengumpulkan informasi terkait penerapan ASN Memayu. Dokumentasi melibatkan pencarian, pengumpulan, dan analisis berbagai dokumen terkait, seperti kebijakan, pedoman, dan laporan terkait implementasi sistem kepegawaian. Pendekatan dokumentasi ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai sejarah, perkembangan, dan dampak yang mungkin dihasilkan oleh digitalisasi sistem Informasi Kepegawaian "ASN Memayu" di Badan Kepegawaian Daerah Istimewa Yogyakarta.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Aplikasi ASN Memayu Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Dalam era informasi yang kian dominan, tata kelola arsip mengalami transformasi signifikan dengan pemanfaatan teknologi tinggi, terutama dalam konteks digitalisasi

dokumen kearsipan. Paradigma ini menggantikan metode konvensional yang bergantung pada proses manual, dan menggiring ke arah pengelolaan arsip berbasis digital. Penggunaan media digital sebagai wadah penyimpanan dokumen memiliki keunggulan signifikan dibandingkan pengarsipan tradisional menggunakan kertas. Digitalisasi, sebagai konsep, mengacu pada proses konversi media dari format cetak, audio, hingga video ke dalam bentuk digital, dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan optimalisasi keamanan serta mengurangi risiko kehilangan data.

Perkembangan Teknologi Informasi (TI) diimplementasikan dengan penuh kreativitas dalam pengelolaan arsip, khususnya dalam konteks pelayanan kepegawaian, sebagaimana telah diperlihatkan oleh Pemerintah Provinsi DIY. Peralihan dari metode manual ke digital dalam manajemen data kepegawaian memberikan kontribusi positif terhadap efisiensi dan efektivitas layanan. Mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pengadaan, hingga administrasi mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, absensi, dan data pensiun, semuanya terdigitalisasi melalui berbagai aplikasi yang mendukung. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat tata kelola internal, tetapi juga memberikan dukungan pelayanan yang terintegrasi kepada pemangku kepentingan, baik di tingkat pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.

Paradigma baru dalam pengelolaan arsip, yang ditandai oleh digitalisasi, menghadirkan sejumlah terobosan yang mendorong kemajuan Teknologi Informasi dalam konteks layanan kepegawaian. Pemerintah Provinsi DIY menjadi contoh nyata implementasi konsep ini dengan memperkenalkan perubahan signifikan dalam siklus pengelolaan data kepegawaian. Aplikasi-aplikasi canggih telah menggantikan prosedur manual, mulai dari perencanaan hingga fase pensiun. Langkah ini menunjukkan komitmen terhadap efisiensi, keamanan, dan akurasi data, sekaligus memastikan pelayanan yang terukur dan berdaya saing.

Dalam mendukung perkembangan Teknologi Informasi, pemanfaatan digitalisasi dalam pengelolaan arsip, khususnya dalam ranah kepegawaian, memberikan dampak positif yang nyata. Pemerintah Provinsi DIY telah berhasil memanfaatkan teknologi dengan bijak, mengadopsi aplikasi-aplikasi modern untuk merampingkan proses administrasi kepegawaian. Dengan demikian, inovasi ini bukan hanya sekadar penyederhanaan tugas-tugas rutin, tetapi juga sebuah langkah strategis dalam memberikan layanan yang efisien dan responsif kepada berbagai stakeholder, termasuk pemerintah pusat, provinsi, dan tingkat kabupaten/kota.

Pada Senin, 8 November, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, secara resmi meluncurkan logo baru dan melakukan rebranding terhadap Simpeg yang kini dikenal sebagai "ASN Memayu" Peluncuran ini berlangsung di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, dan merupakan hasil kerjasama antara Badan Kepegawaian Daerah DIY dan Bank BPD DIY (jogjaprovo.go.id, 2021).



Gambar 1. Logo ASN Memayu

Soft launching logo dan rebranding Simpeg "ASN Memayu" juga melibatkan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara BKD DIY dan Bank BPD DIY. Acara tersebut turut dihadiri oleh Wakil Gubernur DIY, Sekretaris Daerah DIY, Kepala BKD DIY, Direktur Utama Bank BPD DIY, dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Keberadaan Bank BPD DIY dalam kerjasama ini menegaskan komitmen pemerintah DIY untuk memajukan sistem informasi kepegawaian melalui kemitraan strategis dengan sektor perbankan lokal.

Rebranding ini memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kualitas Simpeg "ASN Memayu." Peningkatan tersebut mencakup kemudahan akses dan manfaat pelayanan yang lebih optimal. Selain itu, Sultan Hamengku Buwono X memberikan saran konstruktif, seperti peniadaan kotak penutup logo sebagai langkah transparansi, menggambarkan semangat keterbukaan yang merupakan salah satu ciri utama good governance.



Gambar 2. User Interface ASN Memayu

Gubernur DIY juga menekankan pentingnya memperkuat citra khusus Daerah Istimewa Yogyakarta melalui logo "ASN Memayu." Beliau menyarankan agar warna hijau-kuning pada logo lebih dikontraskan dengan pasangan warna hijau tua dan Pareanom, menciptakan identitas visual yang lebih tajam. Dengan demikian, rebranding Simpeg tidak hanya menjadi inovasi teknologi informasi, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam membangun citra positif dan menggambarkan kesistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta secara lebih kuat.

Sejak peluncuran Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg) inaugural pada tahun 2006, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah melaksanakan pembaruan signifikan melalui implementasi Simpeg 2 yang menghadirkan sejumlah inovasi berpandu pada peningkatan efektivitas. Salah satu pembaruan yang mencolok adalah ASN Memayu, sebuah entitas baru yang menghadirkan perubahan tidak hanya dalam segi identitas visual dengan adopsi logo baru, tetapi lebih jauh memanfaatkan teknologi untuk mengintegrasikan data dan proses kepegawaian.

Pembaruan ini tidak hanya mencakup perubahan identitas visual dengan adopsi logo baru, tetapi juga menggambarkan pergeseran menuju pemanfaatan teknologi yang lebih luas. ASN Memayu, sebagai bagian penting dari sistem, tidak hanya terbatas pada platform website pada <https://asnmemayu.jogjapro.go.id/fw>, melainkan diarahkan untuk dapat diakses melalui aplikasi ponsel, memungkinkan akses yang lebih fleksibel bagi pengguna.

Sistem Informasi Manajemen ASN Berbasis Teknologi Informasi terdiri dari master data, dan modul data. Master data berisi data Pegawai ASN meliputi; data personal, riwayat golongan, riwayat jabatan, riwayat pendidikan, riwayat pendidikan dan pelatihan, riwayat keluarga, riwayat prestasi/hukuman, dan riwayat sasaran kinerja pegawai. Kemudian pada modul data yang menggunakan sistem Single Sign On pada Sistem Informasi Manajemen ASN Berbasis Teknologi Informasi dapat mengakses antara lain; Informasi ASN, Sistem Informasi Individual Performance Management/Si Informan, Sistem Presensi, E-prima/Sistem Presensi Berbasis Mobile, Sistem Pemberian Layanan Administrasi Jabatan Fungsional/Si Bela, Sistem Layanan Kenaikan Pangkat/Aplus Kinangkat, Sistem Administrasi Pengembangan Kompetensi/Si Abang Kompeten, Sistem Informasi Usulan Pensiun PNS/Siulan PNS, dan Sistem Layanan Tenaga Bantu/Si Naban.

Pengembangan Aplikasi ASN Memayu di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah merespon era digitalisasi dengan merancang ulang sistem kepegawaian, yang kini dikenal sebagai ASN Memayu. Dengan fokus pada urusan kepegawaian, aplikasi ASN Memayu menyediakan platform terintegrasi untuk mengakses informasi secara komprehensif mengenai keadaan kepegawaian. Sebagai langkah awal dalam transformasi ini, BKD DIY juga melakukan rebranding pada nama aplikasi, menggantikan SIMPEG menjadi ASN Memayu, serta memperkenalkan logo baru sebagai identitas yang segar.

Pengembangan aplikasi ASN Memayu merupakan inisiatif strategis yang dirancang untuk memperkuat sistem kepegawaian di lingkungan Pemerintah Daerah DIY. Konsepsionalisasi ASN Memayu sejalan dengan prinsip akuntabilitas, integrasi, dan transparansi dalam penanganan kebijakan kepegawaian. Melalui pemanfaatan teknologi digital, ASN Memayu menjadi landasan utama dalam mendukung inisiatif Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), sebuah prestasi yang berhasil diraih oleh BKD DIY pada tanggal 20 Desember 2021, yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pergeseran paradigma dalam pengelolaan kepegawaian di Daerah Istimewa Yogyakarta diwujudkan melalui pengenalan aplikasi ASN Memayu. Aplikasi ini menjadi perangkat terkini dalam penyediaan informasi kepegawaian, memungkinkan akses yang mudah, cepat, dan terintegrasi. Transformasi ini tidak hanya mencakup perubahan nama dari SIMPEG menjadi ASN Memayu, tetapi juga menggambarkan komitmen BKD DIY

terhadap prinsip good governance dengan fokus pada keberlanjutan, keterpaduan, dan akuntabilitas.

Dalam konteks pengelolaan kepegawaian, implementasi ASN Memayu oleh BKD DIY mencerminkan peran proaktif dalam menghadapi dinamika digitalisasi. Rebranding sistem kepegawaian ini membawa konsep akuntabilitas dan transparansi sebagai elemen utama, yang konsisten dengan visi mencapai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Pencapaian WBK pada 20 Desember 2021 menunjukkan komitmen nyata BKD DIY dalam mengadopsi teknologi informasi sebagai sarana untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan kepegawaian, mengukuhkan posisinya sebagai lembaga yang responsif terhadap perkembangan zaman.

Inovasi terbaru yang dihadirkan oleh BKD DIY, yakni ASN Memayu, merupakan bagian integral dari strategi orkestrasi pengelolaan manajemen kepegawaian. ASN Memayu tidak sekadar menyajikan elemen identitas baru dengan penambahan logo, melainkan juga memanfaatkan secara optimal peran teknologi untuk menyelaraskan dan mengintegrasikan data kepegawaian dengan berbagai aspek tugas administratif. Penyempurnaan ini mencakup aspek-aspek seperti sistem keuangan, proses kenaikan pangkat, manajemen pensiun, rekam absensi, dan program pengembangan pegawai.

ASN Memayu, yang diimplementasikan sebagai bagian integral dari Simpeg 2 oleh BKD DIY, merupakan puncak dari evolusi dalam pengelolaan kepegawaian. Perubahan tersebut tidak terbatas pada aspek visual semata, dengan penambahan logo baru sebagai identitas, tetapi lebih mendalam dalam memaksimalkan peran teknologi. ASN Memayu berfungsi sebagai bagian esensial dalam orkestrasi pengelolaan kepegawaian, mencakup seluruh rentang tugas administratif, termasuk aspek keuangan, kenaikan pangkat, pensiun, absensi, hingga pengembangan sumber daya manusia.

Pendekatan progresif dalam pengelolaan data Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) diwujudkan melalui sistem integrasi yang dikenal sebagai ASN Memayu. Inovasi ini mencakup integrasi menyeluruh dari data ASN Pemerintah Daerah DIY, memungkinkan akses yang merata melalui perangkat bergerak (Mobile phone) bagi seluruh ASN. ASN Memayu, sebagai pangkalan data pegawai, merinci data ASN yang telah mengalami proses digitalisasi, memberikan kemudahan akses, dan memperbolehkan unggah mandiri oleh para pegawai. Keunggulan utama adalah kesempatan bagi setiap ASN untuk memverifikasi dan memantau data secara bebas tanpa keterbatasan lokasi kantor.

ASN Memayu tidak hanya bersifat sebagai tempat penyimpanan informasi gaji ASN, melainkan juga dapat digunakan sebagai instrumen transaksi multifungsi. Kartu ini memfasilitasi transfer antar bank, pembelian tiket pesawat, pembayaran tagihan listrik, dan fungsi transaksi lainnya. Kemampuan ini mencerminkan visi integratif yang tidak hanya memperhatikan aspek administratif, tetapi juga memperluas peran kartu ASN Memayu dalam mendukung kebutuhan transaksional sehari-hari ASN. Hal ini memberikan dimensi baru terhadap efisiensi dan kenyamanan dalam melaksanakan kegiatan ekonomi dan administratif.

Kerjasama strategis dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencerminkan upaya bersama dalam meningkatkan kualitas pengelolaan data dan sistem di tingkat nasional dan daerah. Fokus kerjasama ini adalah pada integrasi data dan sistem antara pusat (BKN) dan daerah (ASN Memayu). Proyek ini didasarkan pada prinsip aktualisasi data secara real time, akurasi informasi, dan peningkatan fitur yang ramah pengguna. Dengan demikian, tujuan keseluruhan adalah menghadirkan ekosistem yang mendukung tata kelola data yang efisien dan terkini.

Sebagai bagian dari strategi pengembangan, ASN Memayu telah menginisiasi proses integrasi dengan SAPK, yakni Sistem Informasi ASN Badan Kepegawaian Negara Pusat. Proses integrasi yang masih berada dalam tahap dua arah ini bertujuan untuk memastikan pertukaran data yang sejalan antara kedua platform tersebut. Selain integrasi dengan SAPK, ASN Memayu juga berupaya untuk menyelaraskan diri dengan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya, memungkinkan pertukaran informasi kepegawaian yang efisien dan terukur, mendukung proses percepatan layanan di berbagai instansi.

ASN Memayu, sebagai aplikasi unggulan di Pemerintah Daerah DIY, meraih manfaat signifikan dari integrasi dengan SAPK dan berbagai Perangkat Daerah lainnya. Proses integrasi ini menunjukkan komitmen penuh untuk mencapai keterpaduan data kepegawaian secara nasional. Keberhasilan tahap dua arah dalam integrasi ini menghasilkan jaringan informasi yang dapat diandalkan, mendukung pelaksanaan tugas ASN dengan efisiensi tinggi.

Selain itu, integrasi ini memungkinkan akses dan pertukaran data yang lebih cepat, mempercepat proses layanan di berbagai tingkatan instansi pemerintahan. Kolaborasi integratif ASN Memayu dengan SAPK dan Perangkat Daerah lainnya menjadi pijakan utama dalam pengembangan sistem informasi kepegawaian. Melalui proses integrasi dua arah ini, Pemerintah Daerah DIY membuka peluang untuk memanfaatkan data kepegawaian secara lebih holistik dan akurat. Aplikasi ini, dengan fungsi yang menyeluruh, memberikan solusi efisien bagi ASN dalam mengelola berbagai dokumen kepegawaian, menjadikan proses pencarian dan pengunduhan data lebih cepat dan mudah diakses.

Integrasi ASN Memayu dengan SAPK dan beberapa Perangkat Daerah menciptakan lingkungan informasi yang terpadu dan mendukung percepatan layanan di berbagai instansi pemerintah. Aplikasi ini, sebagai instrumen efektif, memberikan kemudahan bagi seluruh ASN di Pemerintah Daerah DIY dalam manajemen dokumen kepegawaian. Dengan fokus pada aksesibilitas dan personalisasi, ASN Memayu menjembatani kebutuhan individu ASN, memungkinkan mereka untuk mengunduh data kepegawaian secara langsung melalui aplikasi tersebut, mendukung produktivitas dan keterbukaan informasi.

Pemanfaatan Aplikasi ASN Memayu di lingkungan Pemerintah Daerah DIY membawa manfaat konkret bagi setiap Aparatur Sipil Negara (ASN). Salah satu keunggulan utama adalah kemudahan dalam pengelolaan dokumen kepegawaian. ASN dapat dengan mudah mengakses dan mengelola dokumen kepegawaian melalui Aplikasi ASN Memayu tanpa kesulitan. Proses ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga menghilangkan hambatan dalam pencarian dokumen pada saat dibutuhkan. Aplikasi ini secara konsisten memberikan kemudahan kepada ASN untuk mengakses data kepegawaian secara personal dan mengunduh informasi sesuai kebutuhan masing-masing.

Keseluruhan inisiatif ASN Memayu dan kolaborasi dengan BKN membentuk fondasi untuk mengoptimalkan kualitas dan keterjangkauan layanan publik di lingkup Pemerintah Daerah DIY. Melalui pendekatan ini, tercapai aktualisasi data secara waktu nyata, keakuratan informasi, dan antarmuka yang mudah diakses. Selain meningkatkan efisiensi administratif, langkah-langkah ini juga menggarisbawahi pentingnya memberdayakan ASN untuk mengelola data pribadi dan bertransaksi secara mandiri. Dengan demikian, terbentuklah lingkungan administrasi yang efektif, responsif, dan berorientasi pada pemanfaatan teknologi informasi secara optimal.

Faktor Pendukung Penerapan Digitalisasi System Informasi Kepegawaian Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta

ASN Memayu, sebagai aplikasi berbasis website, menunjukkan keunggulan yang sejajar dengan Sistem ASN di Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam pengelolaan ASN. Kelebihan utamanya meliputi kemampuan dalam manajemen ASN, perencanaan kebutuhan, pengadaan ASN, pengembangan kompetensi, manajemen talenta, pembinaan jabatan fungsional, dan pemberhentian PNS. Sebagai perangkat website, ASN Memayu mampu memberikan solusi terintegrasi untuk pengelolaan penuh siklus kepegawaian di berbagai aspek.

Pembaruan sistem kepegawaian melalui ASN Memayu berbasis website mencerminkan komitmen yang sejalan dengan prinsip-prinsip manajemen ASN Badan Kepegawaian Negara. Melalui platform ini, efektivitas dalam perencanaan kebutuhan dan pengadaan ASN dapat dioptimalkan, sementara pengembangan kompetensi dan manajemen talenta dapat diimplementasikan secara efisien. Selain itu, ASN Memayu website memberikan solusi komprehensif untuk pembinaan jabatan fungsional dan penanganan pemberhentian PNS.

Aplikasi ASN Memayu berbasis Mobile menampilkan inovasi yang lebih lanjut dengan menyediakan fitur berbahasa Jawa. Keunikan ini mengakomodasi kebutuhan lokal dan menawarkan pengalaman pengguna yang lebih terpersonalisasi. Selain itu, adanya layanan coaching clinic di dalam aplikasi memberikan fasilitas yang efektif untuk berkomunikasi langsung terkait layanan kepegawaian. Fitur ini memungkinkan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kepegawaian dijawab dengan cepat dan akurat, meningkatkan interaksi dan pelayanan kepada pengguna.

Dalam konteks penerapan teknologi kepegawaian, ASN Memayu berbasis Mobile tidak hanya menonjolkan aspek fungsional, tetapi juga mengutamakan ketersediaan berbahasa Jawa untuk memperkaya pengalaman pengguna. Sementara itu, keberadaan layanan coaching clinic menjadi nilai tambah yang menggambarkan responsivitas terhadap kebutuhan individu dalam layanan kepegawaian. Dengan demikian, ASN Memayu berbasis Mobile mengemuka sebagai solusi yang tidak hanya teknologis, tetapi juga kultural, menandakan komitmen pada pelayanan yang inklusif dan mendalam dalam lingkup kepegawaian.

Dalam menunjukkan keseriusan Gubernur dan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap modernisasi pengelolaan sumber daya manusia, diwujudkan melalui penerbitan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 102 Tahun 2021 Tentang Orkestrasi Pengelolaan Manajemen Kepegawaian Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan ini secara spesifik menyoroti strategi orkestrasi pengelolaan manajemen kepegawaian yang berbasis teknologi informasi. Keputusan ini memberikan landasan hukum yang kokoh untuk mendukung percepatan digitalisasi dalam pengelolaan kepegawaian di lingkup pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam rincian Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 102 Tahun 2021, tergambar dengan jelas grand design mengenai integrasi seluruh manajemen kepegawaian di wilayah tersebut. Konsep ini mengarah pada penciptaan sistem yang terpadu, yang dijuluki sebagai Sistem Informasi Kepegawaian ASN Memayu. Grand design ini mencakup aspek-aspek esensial dalam manajemen kepegawaian, yang akan diintegrasikan dalam kerangka kerja teknologi informasi, membentuk fondasi yang solid untuk mencapai efisiensi dan transparansi.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 102 Tahun 2021 bukan sekadar panduan, melainkan roadmap yang komprehensif menuju transformasi kepegawaian yang berkelanjutan. Dokumen tersebut menggambarkan komitmen gubernur dan pemerintah daerah dalam mengadopsi teknologi informasi untuk memodernisasi manajemen kepegawaian. Pemahaman tentang urgensi digitalisasi manajemen kepegawaian terwujud dalam langkah-langkah konkret, yang merinci bagaimana integrasi dan orkestrasi seluruh sistem kepegawaian akan dicapai melalui Sistem Informasi Kepegawaian ASN Memayu.

Adopsi Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 102 Tahun 2021 menandai tonggak penting dalam evolusi manajemen kepegawaian di wilayah tersebut. Grand design integrasi manajemen kepegawaian menjadi Sistem Informasi Kepegawaian ASN Memayu mencerminkan visi jangka panjang gubernur dan pemerintah daerah untuk mencapai efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya manusia. Dengan landasan hukum yang kuat, langkah-langkah konkret untuk merumuskan kebijakan dan implementasi teknologi informasi dapat dijalankan dengan keyakinan dan kohesi.

SIMPULAN

Penerapan teknologi informasi di Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya dalam pengelolaan data kepegawaian, telah mengalami perkembangan signifikan. Transformasi dari metode manual ke digital, seperti yang ditunjukkan melalui aplikasi ASN Memayu, mencerminkan komitmen terhadap efisiensi, keamanan, dan akurasi data. Penerapan digitalisasi dalam manajemen kepegawaian tidak hanya mencakup aspek internal, tetapi juga mendukung pelayanan terintegrasi kepada berbagai pemangku kepentingan. Implementasi ASN Memayu menciptakan paradigma baru dalam pengelolaan arsip kepegawaian yang berbasis teknologi informasi, memberikan dampak positif dalam efisiensi, kualitas pelayanan, dan citra Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengembangan aplikasi ASN Memayu oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (BKD DIY) menjadi langkah strategis dalam menanggapi era digitalisasi, yang diwujudkan melalui rebranding sistem kepegawaian dan penerapan teknologi digital. Langkah-langkah progresif yang dikembangkan BKD DIY menciptakan fondasi yang solid untuk efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya manusia. Adopsi teknologi informasi dalam manajemen kepegawaian di Pemerintah Daerah DIY bukan hanya sebuah

keharusan, tetapi juga manifestasi nyata dari komitmen untuk mencapai tata kelola yang baik dan pelayanan publik yang optimal melalui pemanfaatan teknologi informasi secara holistik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Bramantyo; M. Arifin, 2020, Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Pada Administrasi Dan Pelayanan Kepegawaian Dalam Kerangka Merit System Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Ham, Modul Teknis Substantif Sistem Informasi Kepegawaian, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, <https://lcbadiklat-jateng.kemenkumham.go.id/wp-content/uploads/2021/02/108-SISTEM-INFORMASI-MANAJEMEN-KEPEGAWAIAN-SEKJEN-min.pdf>
- Alhamri, Rinanza Zulmy; Nugroho, Benni Agung; Cindertama, Toga Aldila, 2018, Instalasai Jaringan Metropolitan Area Network (MAN) di 46 Kelurahan Kota Kediri, J-Indeks: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Terintegrasi, Vol. 2 No. 2, DOI: <https://doi.org/10.33795/jindeks.v2i2.8>
- bkd.jogjaprovo.go.id, 2022, Sosialisasi ASN Memayu Dalam Rangka Kecepatan Digitalisasi Layanan Kepegawaian, Berita Terkait BKD D.I. Yogyakarta, 09 May 2022, diakses dari <https://bkd.jogjaprovo.go.id/informasi-publik/berita/sosialisasi-asn-memayu-dalam-rangka-kecepatan-digitalisasi-layanan-kepegawaian>
- Choirul Anam, Heri Susanto, Dwi Yanto, Fiqri R.G., 2023, Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Masyarakat Desa (Simpelmase) Berbasis Web, Journal of Electrical Engineering and Computer (JEECOM), Vol 5, No. 2, <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/jeeecom/article/view/6966>
- jogjaprovo.go.id, 2021, Gubernur DIY Luncurkan Logo Dan Rebranding Simpeg “ASN Memayu” DETAIL BERITA, 08-11-2021, diskus dari <https://jogjaprovo.go.id/berita/gubernur-diy-luncurkan-logo-dan-rebranding-simpeg-asn-memayu>
- Musdalifah Musdalifah, Nasir Mahmud, Kasmawati Kasmawati, 2019, Implementasi Sistem Informasi Manajemen dalam Mendukung Pelayanan Administrasi di SMA Negeri 1 Barro, Kelola: Journal of Islamic Education Management, Vol 4, No 1, <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/kelola/article/view/785/>
- Nasrika, 2019, Pengembangan Sumber Daya Manusia Pada Era Globalisasi, Seminar Nasional - Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, Revitalisasi Manajemen Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Era Revolusi Industri 4.0, <http://conference.um.ac.id/index.php/apfip2/article/view/376>
- Riskika, Analdo Yoga Dwi; Meirinawati, Meirinawati, 2020, Strategi Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Layanan Simpatik Di Kabupaten Kediri: Studi Kasus Izin Mendirikan Bangunan, Publika, Vol 8 No 4 DOI: <https://doi.org/10.26740/publika.v8n4.p%25p>
- Sabila, Asih, 2022, Efektivitas Aplikasi Reaksi Atas Berita Warga (Rabeg) Online Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Kota Serang, Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah, IPDN, <http://eprints.ipdn.ac.id/9846/>

- Satriya, Dymas Bangkit, 2013, Pengembangan Sumber Daya Aparatur Untuk Meningkatkan Kinerja (Studi di Kantor Kecamatan Lowokwaru Kota Malang), Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1 No. 4,
- Simanjuntak, Naomi A; Moh. Nor Habibi; Prima Ferdiansyah; Achmad Geovani A.M, 2012, Sistem informasi, Organisasi dan Proses Administrasi Publik, FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI, UNIVERSITAS BRAWIJAYA, <http://nurjatiwidodo.lecture.ub.ac.id/files/2012/10/Kel-3-Sistem-informasi-Organisasi-dan-Proses-Administrasi-Publik.pdf>
- Sururi, Ahmad, 2017, Inovasi Kebijakan dalam Perspektif Administrasi Publik Menuju Terwujudnya Good Public PolicyGovernance, Spiritt Publik: Jurnal Administrasi Publik, Vol 12, No 2, <https://doi.org/10.20961/sp.v12i2.16236>
- SYAHRUDDIN, MUH AKBAR, 2019, Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg) Di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/6237-Full_Text.pdf
- Yahya, Afif Syarifudin, 2017, Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat: Civil Service Management Information System At Sanggau District West Borneo Province, Vol 11 No 2 November, <https://jurnal.bkn.go.id/index.php/asn/article/view/40/>